



ANALISIS DISKREPANSI PEMANFAATAN RAPOR PENDIDIKAN PADA JENJANG SEKOLAH DASAR SESUAI PERMENDIKBUDRISTEK NO. 9 TAHUN 2022

Oleh
Baiq Vina Handayani
Universitas Pendidikan Ganesha
baiq.vina@student.undiksha.ac.id

Diterima 25 November 2025, direvisi 9 Desember 2025, diterbitkan 11 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesenjangan dalam pemanfaatan rapor pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data pada jenjang sekolah dasar di Kecamatan Ampenan Provinsi NTB, sebagaimana diamanatkan dalam Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan model evaluasi kesenjangan. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan observasi terhadap 25 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang dipilih secara acak, terdiri dari kepala sekolah, guru, dan operator sekolah. Data dianalisis menggunakan uji tanda berjenjang Wilcoxon untuk mengukur adanya perbedaan serta besar kesenjangan terhadap standar yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan dalam seluruh tahapan pemanfaatan rapor pendidikan tergolong kecil. Rinciannya sebagai berikut: (1) pelaksanaan AN terjadi kesenjangan kecil dengan besar beda 0,8; (2) identifikasi kondisi layanannya menggunakan rapor pendidikan terjadi kesenjangan kecil dengan besar beda 0,71; (3) refleksi penentuan fokus peningkatan layanan untuk setahun kedepan terjadi kesenjangan kecil dengan besar beda 0,68; (4) penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai data pada rapor pendidikan terjadi kesenjangan kecil dengan besar beda 0,75; (5) pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi agar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) mampu melaksanakan perbaikan layanan terjadi kesenjangan kecil dengan besar beda 0,6; (6) penyusunan RKT dan RKAS sesuai prioritas perbaikan pada Rapor Pendidikan terjadi kesenjangan kecil dengan besar beda 0,58; (7) implementasi perencanaan kegiatan yang telah disusun terjadi kesenjangan kecil dengan besar beda 0,87; (8) revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi terjadi kesenjangan kecil dengan besar beda 0,62.

Kata kunci: Analisis Diskrepansi, Pemanfaatan Rapor Pendidikan, Perencanaan Berbasis Data

Abstract

This study aims to identify the level of gap in the use of education report cards as the basis for data-based planning at the elementary school level in Ampenan District, NTB Province, as mandated in Permendikbudristek Number 9 of 2022. The approach used is qualitative descriptive with a gap evaluation model. Data collection was carried out through questionnaires and



observations of 25 educators and education personnel (PTK) who were randomly selected, consisting of school principals, teachers, and school operators. The data was analyzed using the Wilcoxon graded mark test to measure the difference and the size of the gap to the established standard. The results of the study show that the gap in all stages of the use of education report cards is relatively small. The details are as follows: (1) the implementation of AN has a small gap with a difference of 0.8; (2) identification of service conditions using education report cards there is a small gap with a difference of 0.71; (3) reflection on determining the focus of service improvement for the next year there is a small gap with a difference of 0.68; (4) the preparation of learning planning according to the data on the education report card there is a small gap with a difference of 0.75; (5) mapping the need for competency improvement so that educators and education personnel (PTK) are able to carry out service improvements, there is a small gap with a difference of 0.6; (6) the preparation of RKT and RKAS according to the improvement priorities on the Education Report Card there is a small gap with a difference of 0.58; (7) the implementation of the activity planning that has been prepared there is a small gap with a difference of 0.87; (8) Revision of planning and budgeting based on the results of reflection there was a small gap with a difference of 0.62.

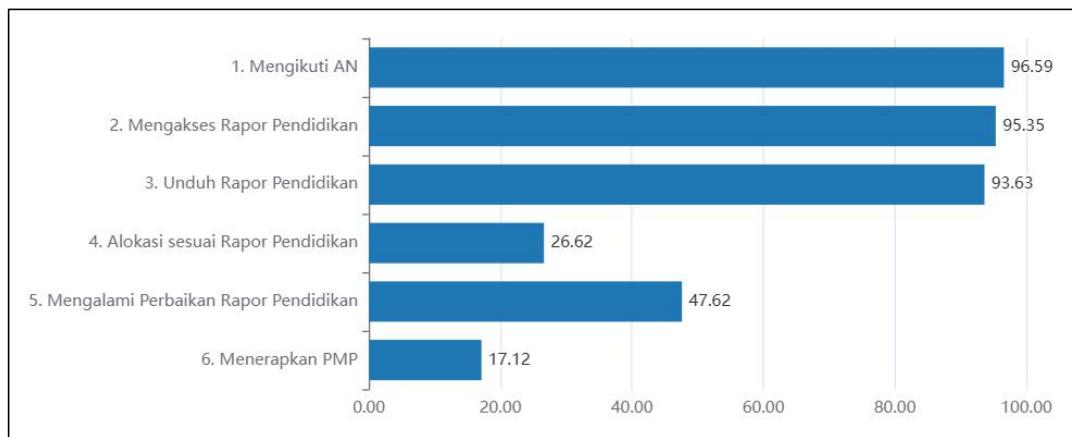
Keywords: *Analysis of Discrepancies, Utilization of Education Report Cards, Data-Based Planning*

I. PENDAHULUAN

Permendikbusdristek nomor 9 tahun 2022 menegaskan tentang evaluasi terhadap sistem pendidikan merupakan kewenangan Menteri yang kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk Rapor Pendidikan. Rapor ini mencakup empat jenis, yaitu rapor satuan pendidikan, rapor program pendidikan kesetaraan, rapor pendidikan daerah dan rapor pendidikan nasional. Secara khusus, pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa rapor satuan pendidikan berfungsi untuk menilai kinerja masing-masing satuan pendidikan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan menengah (Permendikbudristek No 9, 2022). Rapor pendidikan dapat diakses secara daring melalui laman resmi Kementerian Pendidikan, oleh kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan lainnya menggunakan akun belajar yang telah disediakan. Pasal 28 ayat (1), hasil evaluasi sistem pendidikan berupa rapor tersebut dimanfaatkan oleh satuan pendidikan untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisis penyebabnya, dan merancang program intervensi yang relevan. Proses identifikasi ini menuntut sekolah untuk melakukan kajian terhadap data rapor serta melengkapi dengan sumber informasi lain yang relevan. Selain itu penyusunan program kebijakan juga harus melibatkan berbagai pihak terkait, seperti komite sekolah, orang tua siswa, komunitas pendidikan, peserta didik, dan pemangku kepentingan lainnya (Permendikbudristek, 2022).



Perencanaan berbasis data menjadi prasyarat utama untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar di Indonesia, terutama setelah diterbitkannya Permendikbudristek No. 9 Tahun 2022 yang menegaskan peran rapor pendidikan sebagai sumber informasi sistematis tentang capaian kompetensi dan aspek non akademik peserta didik serta layanan pendidikan di sekolah secara komprehensif. Di tingkat sekolah dasar, pemanfaatan data rapor berpotensi menjadi dasar diagnosis kebutuhan pembelajaran, penetapan prioritas intervensi, dan pemantauan efektivitas program pembelajaran. Namun, ketersediaan data tidak otomatis menjamin pemanfaatan yang efektif, sebagaimana terlihat pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Indeks Penerapan PMP Wilayah Kota Mataram Jenjang SD Tahun 2025
(sumber: https://super.pauddasmen.id/superset/dashboard/4/?native_filters_key=ZUL_quSHGGk)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan rapor pendidikan khususnya jenjang SD di Kota Mataram belum optimal dengan penjabaran sebagai berikut:

- (1) sebanyak 96,59% sekolah telah mengikuti Asesmen Nasional (AN) dan masih ada sekitar 3,41% sekolah jenjang SD di Kota Mataram belum mengikuti AN, artinya 3,41% sekolah tersebut belum memiliki profil pendidikan dan rapor satuan pendidikan;
- (2) sebanyak 95,35% sekolah jenjang SD di Kota Mataram telah mengakses rapor pendidikan, sisanya sebanyak 4,65% belum mengakses atau membuka rapor pendidikan;
- (3) sebanyak 93,63% sekolah telah mengunduh rapor pendidikan dan sisanya sebanyak 6,37% sekolah belum mengunduh rapor pendidikan;



- (4) sebanyak 26,62% sekolah melakukan perencanaan dan alokasi penganggaran yang sesuai dengan data pada rapor pendidikan dan sisanya sebanyak 73,38% belum mengalokasikan sesuai rapor pendidikan;
- (5) sebanyak 47,62% sekolah mengalami perbaikan rapor pendidikan (delta positif) dibandingkan dengan tahun sebelumnya, artinya lebih dari 50% sekolah jenjang SD di Kota Mataram tidak mengalami perbaikan pada kualitas layanan pendidikan pada tahun 2025;
- (6) hanya 17,12% sekolah yang telah menerapkan penjaminan mutu pendidikan (PMP), sisanya sebanyak 82,88% belum melakukan PMP.

Data-data ini menunjukkan bahwa sekolah jenjang SD di Kota Mataram belum optimal melakukan penjaminan mutu pendidikan. Permasalahan ini tentunya akan berdampak pada pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di sekolah dilaksanakan melalui dua mekanisme, yakni internal dan eksternal. Mekanisme internal dilakukan oleh sekolah itu sendiri melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), sedangkan penjaminan mutu eksternal dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) melalui Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Salah satu pendekatan yang digunakan oleh sekolah dalam pelaksanaan SPMI adalah Perencanaan Berbasis Data (PBD). Strategi ini mengacu pada pemanfaatan data dari rapor pendidikan sebagai dasar penyusunan program prioritas perbaikan layanan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Untuk mendukung implementasi PBD, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendampingan kepada pemangku kepentingan pendidikan yang mencakup kepala sekolah, guru, pengawas, tenaga kependidikan, serta pejabat di Dinas Pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Meskipun demikian, data yang ditampilkan pada Gambar 1 mengindikasikan bahwa kondisi pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Kemendikdasmen.

Berdasarkan data dan permasalahan tersebut di atas, peneliti ingin melakukan kajian terhadap implementasi pemanfaatan rapor pendidikan khususnya pada jenjang SD di Kota Mataram. Salah satu model evaluasi yang relevan dengan kajian ini adalah Model Evaluasi Diskrepansi atau *Discrepancy Evaluation Model* (DEM). DEM menawarkan kerangka kerja



sistematis untuk menganalisis kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan program, dengan menilai komponen desain, instalasi, proses, dan produk. Dalam dunia pendidikan, penerapan DEM memungkinkan evaluasi komprehensif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dan penyusunan rekomendasi berbasis data (Jumini et al., 2021; Mustafa, 2021).

Penelitian lainnya menunjukkan bahwa DEM menjadi dasar penting untuk merumuskan intervensi kebijakan dan peningkatan kapasitas bagi pelaksana, sehingga pelaksanaan program sejalan dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan (Sherly et al., 2023). Penelitian lain terkait kompetensi kepala sekolah, DEM mengidentifikasi adanya kesenjangan dalam aspek manajerial, kewirausahaan, dan pengawasan dalam kompetensi kepala sekolah, sedangkan dimensi kepribadian dan sosial cenderung sesuai dengan harapan (Salin et al., 2014).

DEM juga digunakan pada program pendidikan jarak jauh untuk mengevaluasi kesenjangan dan mengidentifikasi kendala teknis menjadi faktor penyebab kesenjangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kesiapan sumber daya manusia, dan kurangnya dukungan pengguna. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pendukung agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif (Ariasa et al., 2019).

Penggunaan DEM dalam mengevaluasi program berkembang dan dapat dimodifikasi dengan mengintegrasikannya dengan aplikasi seperti seperti TOPSIS-TTA. Model ini menawarkan keunggulan dalam keakuratan ruang lingkup identifikasi dan evaluasi kesenjangan, meskipun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan beradaptasi sistem dengan kebutuhan pengguna (Divayana et al., 2022). Dari berbagai kajian yang dilakukan menggunakan DEM, DEM menjadi salah satu model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi beragam program dengan fokus pada analisis kesenjangan yang terjadi antara standar dan realita di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menerapkan DEM dalam menganalisis kesenjangan pemanfaatan rapor pendidikan dalam implementasi kebijakan perencanaan berbasis data pada jenjang SD di Kota Mataram Khususnya di Kecamatan Ampenan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022. Adapun langkah-langkah perencanaan berbasis data sesuai dengan PMP dirinci menjadi 8 aksi atau langkah yaitu: 1) Aksi 1 yaitu pelaksanaan AN sesuai prosedur; 2) Aksi 2 yaitu mengidentifikasi kondisi layanannya



menggunakan Rapor Pendidikan; 3) Aksi 3 yaitu refleksi penentuan fokus peningkatan layanan untuk setahun kedepan; 4) aksi 4 yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai data pada rapor pendidikan; 5) Aksi 5 yaitu memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi agar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) mampu melaksanakan perbaikan layanan; 6) Aksi 6 yaitu penyusunan RKT dan RKAS sesuai prioritas perbaikan pada Rapor Pendidikan; 7) Aksi 7 yaitu implementasi perencanaan kegiatan yang telah disusun; 8) Aksi 8 yaitu revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan.

Adapun tujuan penelitian pada kajian ini antara lain: 1) menganalisis diskrepansi Aksi 1 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan ditinjau dari Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022; 2) menganalisis diskrepansi Aksi 2 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan ditinjau dari Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022; 3) menganalisis diskrepansi Aksi 3 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan ditinjau dari Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022; 4) menganalisis diskrepansi Aksi 4 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan ditinjau dari Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022; 5) menganalisis diskrepansi Aksi 5 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan ditinjau dari Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022; 6) menganalisis diskrepansi Aksi 6 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan ditinjau dari Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022; 7) menganalisis diskrepansi Aksi 7 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan ditinjau dari Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022; 8) menganalisis diskrepansi Aksi 8 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan ditinjau dari Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022; 9) menganalisis kendala yang dihadapai dalam melaksanakan Aksi 1 sampai dengan 8 dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan.

II. METODE

Penelitian Evaluasi

Penelitian ini merupakan studi evaluatif yang menjadikan program pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam Perencanaan Berbasis Data (PBD) sebagai objek evaluasinya. Model evaluasi yang diterapkan adalah *Discrepancy Evaluation Model* (DEM), dengan acuan standar yang



merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 9 Tahun 2022. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai suatu variabel sesuai dengan kondisi aktual di lapangan tanpa manipulasi (Dantes, 2012).

Pengumpulan Dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui angket dan observasi. Instrumen yang digunakan mengadopsi skala Likert dengan lima tingkat respons. Setiap item dalam kuesioner menyediakan lima pilihan jawaban yang mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan. Adapun ketentuan penilaian untuk masing-masing pilihan jawaban adalah sebagai berikut: Bila responden memilih alternatif Sangat Setuju (SS), maka diberikan skor 5 untuk pernyataan positif.

- (1) Pilihan Sangat Setuju (SS) diberi skor 5 untuk pernyataan yang bersifat positif;
- (2) Pilihan Setuju (S) diberi skor 4 untuk pernyataan positif;
- (3) Pilihan Netral (N) diberi skor 3 untuk pernyataan positif;
- (4) Pilihan Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 untuk pernyataan negatif; dan
- (5) Pilihan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 untuk pernyataan negatif.

Setelah responden menyelesaikan pengisian instrumen, data yang terkumpul diolah melalui beberapa tahapan, yaitu:

- (1) mentranskrip seluruh hasil dari instrumen yang digunakan.
- (2) merdekusi data dengan menghapus informasi yang tidak relevan.
- (3) mengelompokkan data berdasarkan komponen evaluasi dari masing-masing instrumen.
- (4) melakukan verifikasi antara data angket dan data hasil observasi.
- (5) menganalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan uji non-parametrik dengan menerapkan prosedur *Wilcoxon Signed-Rank Test* untuk mengidentifikasi apakah terdapat kesenjangan (diskrepansi) antara standar acuan yang telah ditetapkan dan realisasi pemanfaatan rapor pendidikan dalam perencanaan berbasis data di tingkat sekolah dasar pada wilayah Kecamatan Ampenan. Uji ini dilakukan dengan menganalisis arah perbedaan “apakah positif atau negative” dari pasangan data



yang berskala ordinal, serta mengukur tingkat selisih antara kondisi ideal dengan implementasi program yang sedang berlangsung (Dantes, 1983).

Responden

Responden pada penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru SD di Kecamatan Ampenan. Pemilihan sampel menggunakan snowball sampling, responden yang terlibat sebanyak 25 orang dari 6 sekolah yang ada di Kecamatan Ampenan yang terdiri dari sekolah swasta dan negeri.

Tabel 1. Karakteristik peserta penelitian

Jabatan		Status Sekolah		Lama Bertugas		Akses Rapor Pendidikan	
Kepala Sekolah	6	Negeri	4	< 3 tahun	5	Belum	3
Guru	13			3-5 tahun	7		
Operator	6	Swasta	2	6-10 tahun	3	Sudah	22
				>10 tahun	10		

Tabel 2. Keterlibatan responden dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan

Aktivitas	Jumlah orang terlibat	Presentase
Perencanaan Pembelajaran	22 orang	88 %
Penyusunan RKT	8 orang	32 %
Penyusunan RKAS/ARKAS	13 orang	52 %
Komunitas belajar (KKG/MGMP/MKKS)	23 orang	92 %
Pelaksanaan AN	22 orang	88 %
Monitoring dan Evaluasi Program	12 orang	48 %
Lainnya	6 orang	24 %

Informasi biografi responden disajikan pada tabel 1 dan informasi keterlibatan responden dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam Perencanaan Berbasis Data disajikan dalam Tabel 2. Sebagian besar responden yang terlibat adalah pegawai dengan pengalaman yang berbeda-beda yaitu didominasi pengalaman lebih dari 10 tahun (10) dan sisanya bekerja pada rentang < 3 tahun (5), 3-5 tahun (7), 6-10 tahun (3). Sekolah negeri mendominasi pada penelitian ini yaitu sejumlah 4 sekolah dari total 6 sekolah yang terlibat. Dari 25 responden tersebut, 3 diantaranya diketahui belum pernah mengakses Rapor Pendidikan.



III. PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis terhadap pelaksanaan Aksi 1, yaitu pelaksanaan Asesmen Nasional (AN) sesuai dengan prosedur, menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,2 dengan selisih (besar beda) sebesar 0,8 dan arah perbedaan negatif (-). Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi AN pada tingkat sekolah dasar belum sepenuhnya mencapai standar acuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat diskrepansi dengan kategori kesenjangan kecil (K) dalam pelaksanaan Aksi 1 sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Berdasarkan hasil ini, seluruh warga sekolah, khususnya kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan lainnya perlu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prosedur pelaksanaan Asesmen Nasional.

Analisis terhadap pelaksanaan Aksi 2, yakni kegiatan identifikasi kondisi layanan menggunakan Rapor Pendidikan dan sumber data tambahan, menghasilkan rata-rata skor sebesar 4,29 dengan selisih (besar beda) 0,71 dan arah perbedaan negatif (-). Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Aksi 2 belum mencapai standar acuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, terdapat diskrepansi dengan kategori kesenjangan kecil (K) dalam pelaksanaan identifikasi kondisi layanan, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Berdasarkan hasil ini, seluruh warga sekolah perlu melakukan identifikasi kondisi layanan secara lebih akurat berdasarkan data yang tersedia dalam Rapor Pendidikan, guna mendukung perbaikan terhadap aspek-aspek layanan yang belum optimal. Hasil analisis aksi 3 yaitu refleksi penentuan fokus peningkatan layanan untuk setahun kedepan diperoleh rata-rata skor 4,32 dengan besar beda sebanyak 0,68 dan arah perbedaan negatif (-). Data ini menunjukkan bahwa aksi 3 belum memenuhi standar acuan. Dengan demikian terjadi diskrepansi dengan kesenjangan kategori kecil (K) pada aksi 3 sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022. Berdasarkan penelitian ini Kepala sekolah bersama warga sekolah lain perlu melakukan refleksi mendalam terhadap penentuan fokus peningkatan layanan agar terjadi perbaikan layanan sesuai permasalahan.

Hasil analisis pada Aksi 4, yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran berdasarkan data dari Rapor Pendidikan, menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,25 dengan selisih (besar beda) 0,75 dan arah perbedaan negatif (-). Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Aksi 4 belum



mencapai standar acuan yang ditetapkan. Dengan demikian, terdapat diskrepansi dengan kategori kesenjangan kecil (K) dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan pembelajaran, sebagaimana tercantum dalam Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Berdasarkan temuan ini, kepala sekolah bersama guru perlu menyusun perencanaan pembelajaran yang selaras dengan kebutuhan belajar peserta didik, sebagaimana tercermin dalam data Rapor Pendidikan.

Hasil analisis pada Aksi 5, yaitu kegiatan pemetaan kebutuhan peningkatan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) menunjukkan rata-rata skor sebesar 4,4 dengan selisih (besar beda) 0,6 dan arah perbedaan negatif (-). Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Aksi 5 belum memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, terdapat diskrepansi dengan kategori kesenjangan kecil (K) dalam pemetaan kebutuhan kompetensi, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Berdasarkan temuan ini, kepala sekolah bersama guru perlu secara sistematis memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi PTK berdasarkan data yang tersedia dalam Rapor Pendidikan.

Hasil Analisis pada Aksi 6 terhadap penyusunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disesuaikan dengan prioritas perbaikan dalam Rapor Pendidikan menunjukkan skor rata-rata 4,42 dengan selisih 0,58 dan arah perbedaan negatif (-). Hasil ini menunjukkan bahwa Aksi 6 belum sepenuhnya mencapai standar acuan. Oleh karena itu, terdapat diskrepansi berkategori kecil (K) dalam penyusunan RKT dan RKAS sebagaimana ketentuan dalam Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Temuan ini menunjukkan pentingnya keterlibatan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah dalam menyusun RKT dan RKAS berdasarkan prioritas perbaikan yang teridentifikasi melalui data Rapor Pendidikan, agar program yang dirancang relevan dengan kebutuhan utama sekolah.

Hasil analisis aksi 7 yaitu implementasi rencana kegiatan yang telah disusun, diperoleh skor rata-rata sebesar 4,13 dengan besar beda 0,87 dan arah perbedaan negatif (-). Nilai ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Aksi 7 masih berada di bawah standar yang telah ditetapkan, sehingga terdapat diskrepansi dengan kategori kesenjangan kecil (K) sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Berdasarkan hasil tersebut, kepala sekolah bersama seluruh warga sekolah perlu memastikan bahwa seluruh perencanaan yang telah dirumuskan dalam dokumen RKT dan RKAS dapat diimplementasikan secara efektif dan konsisten.



Hasil analisis aksi 8 yaitu proses revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang muncul selama implementasi berlangsung menunjukkan skor rata-rata 4,38 dengan selisih 0,62 serta arah perbedaan negatif (-). Temuan ini mengindikasikan bahwa Aksi 8 belum memenuhi standar acuan, sehingga terjadi diskrepansi dengan kategori kesenjangan kecil (K) sebagaimana yang diatur dalam Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022. Oleh karena itu, kepala sekolah bersama warga sekolah lainnya perlu melakukan revisi perencanaan dan penganggaran secara berkala, berdasarkan hasil monitoring dan refleksi selama proses pelaksanaan program berjalan, guna memastikan relevansi dan efektivitas tindakan perbaikan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis penelitian, bahwa aksi 1 pelaksanaan AN sesuai prosedur sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan terdapat diskrepansi atau kesenjangan kategori kecil (K). Hasil ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan warga sekolah seperti guru, operator, bidang perencanaan dan lainnya khususnya pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan sangat perlu memahami dan melaksanakan Asesmen Nasional sesuai prosedur tterutama pada komponen berikut: a) melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali murid tentang pelaksanaan AN; b) tidak melakukan drilling khusus/pendampingan yang melanggar ketentuan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, bahwa aksi 2 sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan terdapat diskrepansi atau kesenjangan kategori kecil (K). Hasil ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan warga sekolah seperti guru, operator, bidang perencanaan dan lainnya khususnya pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan sangat perlu mengidentifikasi kondisi layanannya menggunakan Rapor Pendidikan dan sumber data lain terutama pada komponen berikut: a) Kepala sekolah dan warga sekolah lainnya membaca dan menyimak penjelasan hasil Rapor Pendidikan tahun berjalan dan melihat perbedaan dari tahun sebelumnya; b) Kepala sekolah perlu melakukan rapat atau pertemuan khusus dan rutin untuk membahas temuan pada Rapor Pendidikan; c) setiap temuan pada Rapor Pendidikan diinformasikan dan diketahui oleh seluruh guru.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, bahwa aksi 3 sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan terdapat diskrepansi atau kesenjangan



kategori kecil (K). Hasil ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan warga sekolah seperti guru, operator, bidang perencanaan dan lainnya khususnya pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan sangat perlu melakukan refleksi penentuan fokus peningkatan layanan untuk setahun ke depan terutama pada komponen berikut: a) sekolah menetapkan prioritas perbaikan (fokus) secara partisipatif dan melibatkan guru; b) proses penetapan prioritas jelas berdasarkan kriteria, tahapan dan bukti; c) penetapan fokus berdasarkan data pada Rapor Pendidikan; d) fokus yang ditetapkan konsisten dengan program dan anggaran.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, bahwa aksi 4 sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan terdapat diskrepansi atau kesenjangan kategori kecil (K). Hasil ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan warga sekolah seperti guru, operator, bidang perencanaan dan lainnya khususnya pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan sangat perlu melakukan refleksi penentuan fokus peningkatan layanan untuk setahun ke depan terutama pada komponen berikut: a) hasil Rapor Pendidikan menjadi acuan saat menyusun perencanaan pembelajaran.; b) rencana pembelajaran disosialisasikan dan didokumentasikan dalam kalender akademik

Berdasarkan hasil analisis penelitian, bahwa aksi 5 sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan terdapat diskrepansi atau kesenjangan kategori kecil (K). Hasil ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan warga lainnya khususnya pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan perlu memetakan kebutuhan peningkatan kompetensi agar PTK mampu melaksanakan perbaikan layanan.terutama pada komponen berikut: a) sekolah memiliki rencana tahunan peningkatan kompetensi guru/GTK; b) topik/jenis pelatihan sesuai kebutuhan yang diidentifikasi (FGD, refleksi, Rapor Pendidikan).

Berdasarkan hasil analisis penelitian, bahwa aksi 6 sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan terdapat diskrepansi atau kesenjangan kategori kecil (K). Hasil ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan warga lainnya khususnya pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan perlu melakukan penyusunan RKT dan RKAS sesuai prioritas perbaikan pada Rapor Pendidikan terutama pada komponen berikut: a) RKAS disusun berbasis data (Rapor Pendidikan, rencana pembelajaran, pemetaan kompetensi); b) Penyusunan



anggaran partisipatif & transparan (melibatkan guru/komite sesuai porsi); c) Proses ARKAS/format resmi dipenuhi dan bukti dokumen tersedia.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, bahwa aksi 7 sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan terdapat diskrepansi atau kesenjangan kategori kecil (K). Hasil ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan warga lainnya khususnya pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan perlu mengimplementasikan perencanaan kegiatan yang telah disusun terutama pada komponen berikut: a) program yang dirancang berjalan sesuai rencana dan anggaran; b) monitoring dan evaluasi pelaksanaan dilakukan berkala; c) hasil monev ditindaklanjuti dan menjadi rekomendasi perbaikan/penyesuaian kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, bahwa aksi 8 sesuai dengan Permendikbud nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan terdapat diskrepansi atau kesenjangan kategori kecil (K). Hasil ini menunjukkan bahwa kepala sekolah dan warga lainnya khususnya pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan perlu melakukan revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan terutama pada komponen berikut: a) sekolah merevisi rencana/anggaran berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan baru; b) mekanisme revisi (usulan, persetujuan dinas/ARKAS) dipahami dan diikuti; c) perubahan rencana/anggaran disosialisasikan kepada guru dan pihak terkait.

Berdasarkan hasil analisis penelitian tersebut, 8 aksi perencanaan berbasis data dalam pemanfaatan Rapor Pendidikan masih ada kesenjangan dengan diskrepansi kecil pada jenjang SD di wilayah Kecamatan Ampenan. Setelah melaksanakan observasi, sekolah menghadapi beberapa kendala antara lain:

- (7) Aksi 1 yakni pelaksanaan AN sesuai prosedur. Sosialisasi sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Mataram kepada sekolah dan Kepala sekolah melanjutkan sosialisasi kepada PTK namun sosialisasi kepada orang tua/wali murid masih jarang dilakukan baik berupa sosialisasi langsung ataupun tidak langsung seperti Whatsapp Group.
- (8) Aksi 2 yaitu identifikasi kondisi layanan melalui Rapor Pendidikan atau data lainnya. Pemahaman Kepala sekolah, guru, operator dan warga sekolah lainnya masih terbatas dalam membaca data pada Rapor Pendidikan meskipun sudah ada panduan penggunaan atau pemanfaatan pada laman Rapor Pendidikan. Hal ini disebabkan karena warga sekolah



jarang membuka Rapor Pendidikan dan tidak dibahas dalam diskusi atau pertemuan khusus. Selain itu sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Mataram dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah dilakukan terkait dengan Rapor Pendidikan namun hanya menyasar pada beberapa sekolah karena keterbatasan pendanaan. Sehingga diharapkan perwakilan yang mengikuti kegiatan sosialisasi dapat mendeseminasiannya dalam pertemuan rutin komunitas belajar (kombel) baik melalui MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah) atau MKPS (Musaywarah Kerja Pengawas Sekolah) namun hal tersebut juga belum maksimal. Jumlah pengawas yang terbatas pada setiap kecamatan juga menjadi kendala sehingga penyampaian informasi dan pendampingan kepada sekolah menjadi terbatas.

- (9) Aksi 3 yaitu refleksi penentuan prioritas layanan selama setahun kedepan. Kendala pada aksi ini adalah lanjutan dari kendala pada Aksi 2 karena identifikasi dan refleksi merupakan kegiatan yang berkelanjutan seperti pemahaman pada identifikasi kurang maka pemahaman melakukan refleksi juga terbatas. Kegiatan refleksi memerlukan waktu untuk warga sekolah mendiskusikan secara bersama-sama fokus penentuan prioritas layanan selama satu tahun, namun Kepala sekolah dan operator biasanya menyusunnya dan tidak melibatkan warga sekolah lainnya secara lebih maksimal.
- (10) Aksi 4 yaitu penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai data pada Rapor Pendidikan. Data pada Rapor pendidikan menunjukkan data hasil belajar peserta didik seperti data literasi dan numerasi. Data hasil belajar ini belum menjadi acuan guru dalam merancang pembelajaran di kelas sehingga belum sesuai dengan kebutuhan layanan. Minimnya pemahaman dan kepedulian pada data tersebut menjadi kendala terbesar dalam Aksi 4.
- (11) Aksi 5 yaitu kebutuhan peningkatan kompetensi PTK berdasarkan pada data Rapor Pendidikan. Sekolah belum menggunakan Rapor Pendidikan sebagai acuan dalam merancang kebutuhan peningkatan kompetensi PTK hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dalam memaknai data pada Rapor sehingga tidak maksimal dalam mengimplementasikannya terutama pada kebutuhan peningkatan kompetensi sehingga peningkatan kompetensi yang dilakukan di sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas.



Misalnya, data Rapor Pendidikan menunjukkan bahwa hasil belajar pada indikator literasi sekolah A terjadi penurunan disebabkan karena akar permasalahan seperti metode pembelajaran yang monoton dalam pembelajaran literasi sehingga sekolah perlu melaksanakan peningkatan kompetensi guru dalam metode pembelajaran literasi tersebut.

- (12) Aksi 6 yaitu penyusunan RKT dan RKAS sesuai prioritas perbaikan pada Rapor Pendidikan. Berdasarkan hasil observasi, penyusunan RKT dan RKAS terjadi diskrepansi kecil tidak hanya disebabkan karena pemahaman membaca data yang terbatas pada Kepala Sekolah dan warga sekolah lainnya. Namun, kendala lain teridentifikasi seperti waktu terbitnya Rapor Pendidikan yang tidak sesuai dengan waktu penyusunan RKT dan RKAS. Pemerintah menerbitkan Rapor Pendidikan biasanya pada awal tahun, namun sekolah sudah merancang RKT dan RKAS di akhir tahun sebelumnya untuk proses pencairan dana BOS di tahun berikutnya. Hal ini yang menyebabkan ketidaksesuaian RKT dan RKAS di tahun berjalan dengan hasil Rapor Pendidikan terbaru. Kendala lain adalah keterbatasan Kepala sekolah dan warga sekolah lain seperti guru dan operator dalam memahami penggunaan format RKT dan RKAS yang disediakan pada unduhan Rapor Pendidikan. Terbatasnya pendampingan dalam penyusunan RKT dan RKAS sesuai dengan prioritas perbaikan pada Rapor Pendidikan menjadi kendala besar.
- (13) Aksi 7 yaitu mengimplementasikan rencana kegiatan yang telah disusun pada RKT dan RKAS. Sebagian besar rencana kegiatan sesuai dengan RKT dan RKAS yang dirancang namun terkadang implementasi tidak sesuai ketika ada kegiatan dadakan yang harus dilaksanakan dan tidak sesuai dengan rencana yang sudah disusun sehingga perlu dilakukan perubahan pada waktu perubahan ARKAS.
- (14) Aksi 8 yaitu revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan. Kendala pada aksi 8 ini terletak pada kesesuaian pos-pos anggaran. Perubahan RKAS yang dilakukan oleh sekolah terbatas pada kegiatan-kegiatan dengan pos anggaran yang sama. Pemahaman terkait dengan anggaran ini juga terbatas diketahui baik oleh Kepala Sekolah, guru maupun pihak lain yang terlibat dalam penyusunan RKAS. Hal ini menyebabkan terkadang perubahan tidak dilakukan oleh sekolah karena khawatir tidak sesuai dengan ketentuan pada ARKAS.



IV. SIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang evaluasi pemanfaatan Rapor Pendidikan dalam PBD sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 dengan menggunakan model evaluasi DEM sangat tepat digunakan. Masing-masing aksi dalam pelaksanaan PBD dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Terjadi kesenjangan yang kecil pada aksi 1 yaitu pelaksanaan AN sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan dengan rata-rata skor 4,2 dengan besar beda sebanyak 0,8 dan arah perbedaan negatif (-).
- (2) Terjadi kesenjangan yang kecil pada aksi 2 yaitu identifikasi kondisi layanan melalui Rapor Pendidikan atau data lainnya sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan dengan skor 4,29 dengan besar beda sebanyak 0,71 dan arah perbedaan negatif (-)
- (3) Terjadi kesenjangan yang kecil pada aksi 3 yaitu refleksi penentuan prioritas layanan selama setahun kedepan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan dengan skor 4,32 dengan besar beda sebanyak 0,68 dan arah perbedaan negatif (-).
- (4) Terjadi kesenjangan yang kecil pada aksi 4 penyusunan perencanaan pembelajaran sesuai data pada Rapor Pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan dengan rata skor 4,25 dengan besar beda sebanyak 0,75 dan arah perbedaan negatif (-)
- (5) Terjadi kesenjangan yang kecil pada aksi 5 yaitu kebutuhan peningkatan kompetensi PTK berdasarkan pada data Rapor Pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan dengan skor 4,4 dengan besar beda sebanyak 0,6 dan arah perbedaan negatif (-).
- (6) Terjadi kesenjangan yang kecil pada aksi 6 penyusunan RKT dan RKAS berdasarkan prioritas perbaikan pada Rapor Pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan dengan skor 4,42 dengan besar beda sebanyak 0,58 dan arah perbedaan negatif (-).



(7) Terjadi kesenjangan yang kecil pada aksi 7 yaitu mengimplementasikan rencana kegiatan yang telah disusun pada RKT dan RKAS sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan dengan skor 4,13 dengan besar beda sebanyak 0,87 dan arah perbedaan negatif (-).

(8) Terjadi kesenjangan yang kecil pada aksi 8 revisi perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi dan kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi berjalan sesuai dengan Permendikbudristek nomor 9 tahun 2022 pada jenjang SD di Kecamatan Ampenan dengan skor 4,38 dengan besar beda sebanyak 0,62 dan arah perbedaan negatif (-).

(9) Kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai berikut:

- Belum maksimalnya sosialisasi AN kepada orang tua atau wali murid sebagai terkait AN sebagai data hasil evaluasi kondisi layanan terkini di sekolah.
- Terbatasnya pemahaman Kepala sekolah dan warga sekolah lain seperti guru, operator dan lainnya terkait identifikasi data pada Rapor Pendidikan disebabkan karena sosialisasi yang kurang maksimal dan terbatas.
- Pelibatan warga sekolah lain seperti guru dalam melaksanakan refleksi data hasil Rapor Pendidikan.
- Data hasil belajar pada Rapor Pendidikan belum menjadi acuan guru dalam merancang pembelajaran di kelas sehingga belum sesuai dengan kebutuhan layanan
- Sekolah belum menggunakan Rapor Pendidikan sebagai acuan dalam merancang kebutuhan peningkatan kompetensi PTK hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dalam memaknai data pada Rapor Pendidikan.
- Waktu terbitnya Rapor Pendidikan yang tidak sesuai dengan waktu penyusunan RKT dan RKAS menjadi kendala dalam penyusunan RKT dan RKAS yang sesuai dengan prioritas perbaikan pada Rapor Pendidikan.
- Kegiatan dadakan yang harus dilaksanakan dan tidak sesuai dengan rencana yang sudah disusun sehingga perlu dilakukan perubahan pada waktu perubahan ARKAS menyebabkan ketidaksesuaian implementasi rencana kegiatan.



- Terbatasnya pemahaman Kepala Sekolah dan warga sekolah lain terkait dengan perubahan ARKAS sehingga menjadi kendala dalam melakukan revisi rencana dan anggaran kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansah, A., Komara, D. A., & Halimah, L. (2022). Evaluation of the library management program as a learning resource with discrepancy model. *Curricula: Journal of Teaching and Learning*, 1(1), 87–100. doi:10.17509/curricula.v1i1.48538

Ariasa, I. W., Marheni, A. A. I. N., & Widiartini, N. K. (2019). Analisis diskrepansi pelaksanaan layanan tupoksi bagian dan sub bagian di lingkungan Biro Akpk Universitas Pendidikan Ganesha sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 14 Tahun 2016. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Indonesia*, 9(2)

Dantes, N. (1983). *Variabel penelitian dan perumusan hipotesis*. Singaraja, Bali: Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Unud.

Dantes, N. (2012). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Andi.

Divayana, D. G. H., Ariawan, I. P. W., & Adiarta, A. (2022). Design of new evaluation model based on Discrepancy Daiwi Asuri Sampad. *Emerging Science Journal*, 6(1), 166–184. doi:10.28991/ESJ-2022-06-01-013

Jumini, S., Rusilowati, A., Sutikno, S., Cahyono, E., Parmin, P., & Firdaus, F. (2021). Discrepancy evaluation models in physics project-based learning of student entrepreneurship character. *Journal of Physics: Conference Series*, 1918(2), 022042. doi:10.1088/1742-6596/1918/2/022042

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Jakarta, Indonesia.

Madaus, G. F., Scriven, M., & Stufflebeam, D. L. (Eds.). (1983). *Evaluation models viewpoints on educational and human services evaluation* (1st ed.). Boston, MA: Kluwer-Nijhoff Publishing.

Mustafa, P. S. (2021). Model Discrepancy Sebagai Evaluasi Program Pendidikan. *PALAPA: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 9(1). <https://ejurnal.stitpn.ac.id/index.php/palapa>

Provus, M. M. (1969). *The discrepancy evaluation model: An approach to local program improvement and development*. Pittsburgh, PA: Pittsburgh Public Schools.

Salin, I. M., Dantes, N., Ketut, G., & Sunu, A. (2014). Analisis diskrepansi pelaksanaan kompetensi kepala sekolah berbasis Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 di lingkungan



sekolah dasar Seraya Timur, Kecamatan Karangasem. *Jurnal Administrasi Pendidikan UNDIKSHA*, 5

Saputra, N. M. A., Wahyu, R., & Rahman, D. H. (2022). Evaluation of counseling programs at junior high schools in Malang Regency during the Covid-19 pandemic: Discrepancy model. *KONSEL: Jurnal Bimbingan dan Konseling (E-Journal)*, 9(2), 157–166. doi:10.24042/kons.v9i2.12223

Sherly, Kisno, Mudjisusatyo, Y., Purba, S., Dharma, E., & Sihombing, H. B. M. (2023). Discrepancy evaluation model on certification competency test implementation of vocational high school. *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 56(1), 149–159. doi:10.23887/jpp.v56i1.53843

Steinmetz, A. (2000). The discrepancy evaluation model. In D. L. Stufflebeam, G. F. Madaus, & T. Kellaghan (Eds.), *Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation* (pp. 127–143). New York, NY: Springer. doi:10.1007/0-306-47559-6_7

Supranto, J. (2000). *Statistik teori dan aplikasi* (Edisi ke-6). Jakarta: Erlangga.

Suyasa, P. W. A., & Divayana, D. G. H. (2021). Modification of cse-ucla and discrepancy as a new evaluation model in education. *Emerging Science Journal*, 5(6), 929–942. doi:10.28991/esj-2021-01321

Widyastuti, W., & Haryanto, H. (2023). Evaluation of inclusive elementary school learning in Yogyakarta. *Al-Ishlah Jurnal Pendidikan*, 15(3), 2768–2779. doi:10.35445/alishlah.v15i3.1064